

PERAN DISKOPERINDAG DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN MIMBAAN KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO

Fathiyatus Sholihah¹, Vita Novianti², Hari Susanto³

¹²³Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email : fathiyatussholihah23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi peran penting UMKM dalam perekonomian, terutama UMKM di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat. Permasalahan yang dialami UMKM diantaranya; keterbatasan modal usaha dan tidak ada pendampingan pasca pelatihan. Sehingga dibutuhkan dukungan Diskoperindag Kabupaten Situbondo kepada para pelaku UMKM melalui adanya program pemberdayaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mengenai peran Diskoperindag serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Diskoperindag Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat dilihat dari tiga indikator peran yaitu peran Diskoperindag sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Faktor pendukung program pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mimbaan yaitu adanya pelatihan dan fasilitas tempat untuk pemasaran bagi para pelaku UMKM. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan modal, pemasaran produk yang kurang luas, pendampingan dan bantuan teknis yang diberikan oleh dinas masih kurang memadai serta pengajuan bantuan hibah yang dinilai rumit. Penelitian ini menunjukkan peran Diskoperindag kurang optimal dalam program pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, UMKM

ABSTRAK

This research is motivated by the important role of MSMEs in the economy, especially MSMEs in Mimbaan Village, Panji District, Situbondo Regency in improving the economy in the community. The problems experienced by MSMEs include; limited business capital and no post-training assistance. So that the support of the Situbondo Regency Diskoperindag is needed for MSME actors through an empowerment program. The purpose of this study is to describe the role of Diskoperindag as well as the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of the MSME empowerment program implemented by the Situbondo Regency Diskoperindag. This research uses qualitative research with descriptive methods. The data obtained in this study were collected through observation, interviews, and documentation. The result of the study can be seen from three role indicators, namely the role of Diskoperindag as facilitator, regulator and catalyst. Supporting factors for the MSME empowerment program in Mimbaan Village are training and facilities for marketing for MSME players. Meanwhile, the inhibiting factors are limited capital, less extensive product marketing, inadequate assistance and technical assistance provided by the agency and the application for grant assistance which

is considered complicated. This research shows that the role of Diskoperindag is not optimal in the MSME empowerment program in Mimbaan Village, Panji District, Situbondo Regency.

Keyword: Role, Empowerment, MSME

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan sektor riil. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di sektor informal. Namun UMKM di Indonesia masih mengalami beragam tantangan seperti terbatasnya akses ke pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya strategi pemasaran, serta kurangnya pemahaman tentang teknologi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional dan mampu bertahan selama krisis global. Perkembangan yang sangat pesat mendorong minat masyarakat, termasuk generasi muda untuk berwirausaha. UMKM juga menjadi sumber pendapatan dan peluang kerja, sehingga mengurangi pengangguran.

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan berperan penting dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Salah satu tugas utamanya adalah memberdayakan pelaku UMKM berupa; pelatihan teknis, manajerial, dan kewirausahaan. Pemberdayaan UMKM bertujuan menurunkan angka pengangguran, mengatasi kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan. Pemberdayaan UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah pasal 1 ayat 10 "Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan penguatan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM".

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo memiliki 5 Program, yaitu: (1) Pemantauan Harga Pasar, (2) Pemberdayaan UMKM, (3) Metrologi, (4) Pembinaan dan pelatihan IKM, (5) Metrologi. Dari kelima program tersebut, peneliti fokus terhadap program Pemberdayaan UMKM karena UMKM merupakan sektor yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. UMKM di Kabupaten Situbondo memiliki beberapa jenis sektor, berikut jumlah UMKM di Kabupaten Situbondo berdasarkan Jenis Sektornya tahun 2024:

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Di Kabupaten Situbondo

No.	Jenis Sektor	Jumlah UMKM
1.	Industri Pengolahan	14 UMKM
2.	Jasa-Jasa	713 UMKM
3.	Perdagangan	3.753 UMKM
4.	Persewaan	2 UMKM
5.	Pertanian	34 UMKM
6.	Peternakan	66 UMKM
Jumlah		4.582 UMKM

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Situbondo tahun 2024

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Situbondo menunjukkan dinamika yang cukup beragam, dimana masing-masing pelaku usaha bergerak di sektor yang berbeda-beda sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Tabel 1.1 menunjukkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Situbondo yang dikelompokkan berdasarkan jenis sektornya, dan sektor usaha yang banyak adalah sektor perdagangan yang berjumlah 3.753 UMKM, dan sektor jasa-jasa berjumlah 713 UMKM.

Kabupaten Situbondo memiliki 17 kecamatan dengan jumlah UMKM yang terus berkembang. Hal ini mengindikasikan potensi ekonomi lokal yang terus berkembang potensi ekonomi lokal berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan di daerah. Berikut adalah jumlah UMKM Kabupaten Situbondo berdasarkan Kecamatan (2024).

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Kabupaten Situbondo/Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Kecamatan Panji	5.042 UMKM
2.	Kecamatan Bungatan	8 UMKM
3.	Kecamatan Arjasa	1.288 UMKM
4.	Kecamatan Asembagus	3.463 UMKM
5.	Kecamatan Banyuglugur	1 UMKM
6.	Kecamatan Banyuputih	3 UMKM
7.	Kecamatan Besuki	66 UMKM
8.	Kecamatan Jangkar	1 UMKM
9.	Kecamatan Jatibanteng	729 UMKM
10.	Kecamatan Kapongan	3.509 UMKM
11.	Kecamatan Mangaran	2.346 UMKM
12.	Kecamatan Mlandingan	5 UMKM
13.	Kecamatan Kendit	1.637 UMKM
14.	Kecamatan Panarukan	35 UMKM
15.	Kecamatan Situbondo	24 UMKM
16.	Kecamatan Suboh	726 UMKM
17.	Kecamatan Sumbermalang	428 UMKM
Jumlah		38.434 UMKM

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Situbondo 2024

Tabel 1.2 menunjukkan Kecamatan Panji yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah paling banyak, diikuti Kapongan, Asembagus, Kendit dan Arjasa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah UMKM paling sedikit adalah Kecamatan Jangkar dan Banyuglugur. Berkembangnya jumlah UMKM di masing-masing kecamatan tersebut tentunya tidak lepas dari peran pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan UMKM. Kecamatan panji memiliki dua kelurahan dan sepuluh desa yang masing-masing memiliki potensi yang beragam, serta berperan penting dalam kemajuan ekonomi dan sosial di wilayah Kabupaten Situbondo seperti yang ditampilkan pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah UMKM berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Panji

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah UMKM
1.	Kelurahan Mimbaan	2.138 UMKM
2.	Kelurahan Ardirejo	308 UMKM

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah UMKM
3.	Desa Battal	25 UMKM
4.	Desa Curah Jeru	715 UMKM
5.	Desa Juglangan	224 UMKM
6.	Desa Kayu Putih	202 UMKM
7.	Desa Klampokan	4 UMKM
8.	Desa Panji Kidul	1.548 UMKM
9.	Desa Panji Lor	1.581 UMKM
10.	Desa Sliwung	97 UMKM
11.	Desa Tenggir	546 UMKM
12.	Desa Tokelan	100 UMKM
Jumlah		7.488 UMKM

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Situbondo 2024

Penelitian ini fokus pada UMKM di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji dengan dasar pertimbangan Kelurahan Mimbaan memiliki jumlah UMKM paling banyak sehingga memiliki potensi besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Kelurahan Mimbaan. Selain itu karena jumlah UMKM paling banyak, fokus penelitian ini diarahkan pada Kelurahan Mimbaan karena berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Mimbaan pada tanggal 8 Februari 2025. Yaitu Ibu Nurhasana (32th) pemilik usaha Kerupuk Rambak Kurnia Jaya, Bapak Mohammad Jazak (40th) pemilik usaha Keripik Tempe Yuzak, Ibu Maria (30th) pemilik usaha Rengginang Mentari. Dimana mereka menyampaikan bahwa

Diskoperindag Kabupaten Situbondo memang sering mengadakan pameran akan tetapi informasi yang diberikan kepada pelaku UMKM sangat terbatas, selain itu pelaku UMKM juga mengalami permasalahan dalam hal permodalan. Hal ini membuat para pelaku UMKM belum dapat berkembang karena keterbatasan modal. Selain itu para pelaku UMKM mengeluhkan tentang minimnya fasilitas yang diberikan bahkan ada beberapa pelaku UMKM yang mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan dalam bentuk fasilitas apapun. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Diskoperindag hanya sebatas pelatihan saja tanpa ada pendampingan sehingga para pelaku UMKM mengaku belum mampu mengembangkan keterampilan dari hasil pelatihan yang diberikan dalam menjalankan usahanya.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eriyanti Fitri & Islam Aldiniatul (2024) Diskoperindag Kota Sawahlunto sudah melaksanakan perannya dalam memberdayakan pelaku Industri Kecil dan Menengah tetapi masih kurang maksimal dalam penyelenggaraannya karena masih terdapat sejumlah faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadli Feri, dkk (2022) ditemukan hasil bahwa Dinas Koperasi telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan UMKM dengan cukup baik, akan tetapi terdapat kendala yang dihadapi para pelaku UMKM yaitu mengenai permodalan, lemahnya kemampuan penetrasi pasar, usaha yang sepenuhnya belum kondusif serta terbatasnya sarana dan prasarana serta akses pasar dan terbatasnya sumber daya manusia. Hal ini membuat penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih detail mengenai bagaimana peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan program pemberdayaan kepada para pelaku UMKM serta menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2020:18) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berkenaan dengan data yang bukan bersifat angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Jenis data dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang memahami atau tau betul mengenai permasalahan yang akan diteliti, wawancara dilakukan secara *face to face*. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian dimana peneliti mengumpulkan data yang dilakukan secara gabungan dan data yang diperoleh tidak bersifat angka melainkan bersifat naratif, karena data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo yang bertempat di Jl. Sucipto, Parse, Dawuhan, Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dan para pelaku UMKM di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari tahun 2025 hingga bulan April tahun 2025.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dimana data yang dikumpulkan selama melakukan penelitian, yaitu dengan melakukan reduksi atau merangkum, memilah informasi yang penting dan relevan, serta dikelompokkan data-data yang sejenis. Setelah melakukan proses reduksi, data disajikan dalam bentuk teks narasi, dan akhirnya kesimpulan diambil dari data yang sudah disajikan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam memberdayakan UMKM di Kelurahan Mimbaan dapat dilihat dari beberapa indikator yang dikemukakan oleh (Gede Diva, 2019:15) sebagai berikut:

1. Peran sebagai Fasilitator

Peran Diskoperindag sebagai fasilitator, dinas memberikan fasilitas dalam hal pelatihan, dalam pelaksanaannya tidak bisa dipastikan berapa kali dalam setahun karena masih bergantung dan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dinas juga menyediakan tempat pemasaran bagi pelaku UMKM, diantaranya tempat pusat oleh-oleh Situbondo, Irian Jaya *Night*, dan di etalse utama raya, selain itu dinas mendampingi pelaku UMKM dalam pengajuan pinjaman modal ke bank serta bantuan hibah. Akan tetapi para pelaku UMKM masih mengalami kendala dalam hal bantuan permodalan dan bantuan hibah yang prosedur pengajuan masih dinilai rumit oleh sebagian pelaku UMKM. Dinas juga tidak memberikan bantuan permodalan kepada pelaku UMKM, melainkan dinas hanya membantu pelaku UMKM dalam mengajukan bantuan pinjaman modal tersebut ke bank dengan merekomendasikan bank yang memiliki suku bunga rendah agar pelaku UMKM tidak terjebak dalam pinjaman yang bersuku bunga besar.

Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eriyanti Fitri & Islam Aldiniatul (2024) yang berjudul peran Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam pemberdayaan industri kecil masyarakat di Desa Balai Batu Sandaran, bahwa sebagai fasilitator salah satunya dengan menyediakan pelatihan dan pembinaan ke pelaku ikm serai wangi baik yang diadakan di dalam Kota Sawahlunto

maupun pelatihan di tingkat provinsi, memberikan akses bantuan permodalan dan membantu dalam hal mempromosikan produk.

2. Peran sebagai Regulator

Peran Diskoperindag sebagai regulator, dinas membantu dan melayani para pelaku UMKM dalam pembuatan perizinan usaha, selain itu dinas juga memberikan kemudahan dalam pembuatan perizinan usaha, diantaranya adalah pembuatan nomor induk berusaha (NIB), sertifikatt halal, izin edar, dan izin kelayakan produk. Dinas juga selalu menyarankan kepada pelaku UMKM agar usahanya memiliki surat izin, selain itu diketahui bahwa proses pembuatan izin usaha cukup mudah dan cukup cepat, yaitu sekitar 2-3 hari. Kecuali dalam pembuattan sertifikat halal yang memakan waktu lebih lama, karrena prosedurnya yang sangat teliti dan banyak hal yang harus diperiksa terlebih dahulu.

Hal ini didukung dengan hasil pennelitian dari Bahy Nikolin Maria (2024) yang berjudul peran pemerintah kalurahan dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah studi kasus di Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, bahwa dengan adanya legalitas dapat meningkat kepercayaan dan keminatan konsumen yang dimana dapat memberikan jaminan atau kualitas produuk makanan.

3. Peran sebagai Katalisator

Peran Diskoperindag sebagai katalisator, dinas dalam hal ini hanya menyarankan kepada para pelaku UMKM agar membuat hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang meliputi pendaftaran merk usaha, rahasia dagang, desain produk dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Namun dalam pelaksanaanya beberapa pelaku UMKM masih ada yang belum mengurus HAKI.

Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian Hesti, Abdul, Abdullah (2023) yang berjudul peranan dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah kota malang, bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan berbagai upaya pembinaan sumber daya manusia (SDM), pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan kewirausahaan yang berupa pelatihan mengenai peningkatan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan pelatihan tentang prosedur kepengurusan Hak Paten, Hak Merk.

Faktor Pendukung Dalam Program Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mimbaan adalah adanya pemberdayaan yang berupa pelatihan, pembuatan perizinan yang mudah dan cepat dan pemasaran produk UMKM yang diberikan oleh dinas.

1. Pelatihan

Diskoperindag Kabupaten Situbondo sudah memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM, pelatihan yang diberikan berupa keterampilan pembuatan produk, pengelolaan keuangan dan pemasaran secara online. Akan tetapi pelatihan yang diberikan oleh Diskoperindag tidak bisa dittentukan berapa kali dalam setahunnya, karena menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Hesti, Abdul, Abdullah (2023) yang berjudul peranan dinas koperasi dan ukm dalam pembeerdayaan UKM Kota Malang, bahwa dukungan pihaaak Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang bahwa memberikan bantuan narasumber pada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Malang sangatlah dibutuhkan.

2. Kemudahan dalam pembuatan perizinan usaha

Diskoperindag Kabupaten Situbondo sudah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam pembuatan perizinan usaha para pelaku UMKM. Dinas dalam hal ini juga selalu memastikan produk UMKM sudah memiliki legalitas dan aman untuk di jual belikan. Para pelaku UMKM di Kelurahan Mimbaan juga sudah memiliki legalitas atas produknya, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, izin edar dan izin kelayakan produk. Dinas juga selalu menyarankan para pelaku UMKM agar usahanya memiliki surat izin. Selain itu diketahui bahwa proses pembuatan izin usaha cukup mudah dan cukup cepat, yaitu ssekitar 2-3 hari jadi. Kecuali dalam pembuatan sertifikat halal yang memakan waktu lebih lama, dikarenakan prosedurnya yang sangat teliti dan banyak hal yang harus diperiksa terlebih dahulu.

Hal ini didukung oleh adanya penelitian yang dilakukan ooleh (Hanif, 2024) bahwa legalitas usaha merupakan hal yang harus dilakukan atau dimiliki oleh para pelaku usaha dalam memulai bisnisnya. Karrena dengan adanya legaalitas, usaha/bisnis yang dilakukan akan dianggap sah untuk beroperasi karena sudah memiliki izin dari pihak yang berwenang.

3. Pemasaran produk UMKM

Diskoperindag Kabupaten Situbondo dalam hal ini juga memfasilitasi para pelaku UMKM dengan menyediakan tempat pemasaran produk UMKM, tempat yang disediakan oleh diskoperindag Kabupaten Situbondo adalah pusat oleh-oleh situbondo, irian jaya *night*.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Eriyanti Fitri & Islam Aldiniatul (2024) yang berjudul peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam pemberdayaan ikm di Desa Balai Batu Sandaran, bahwa dinas mendukung pelaku ikm dalam hal pemasaran dengan mepromosikan produk melalui kegiatan pameran, bazar ataupun event agar jangkauan pasarnya lebih luas.

Faktor Penghambat Dalam Program Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo

Faktor penghambatnya adalah karena keterbatasan modal yang dialami oleh pelaku UMKM, pemasaran produk yang kurang luas, pendampingan dan bantuan teknis yang diberikan oleh dinas masih kurang memadai dan pengajuan bantuan hibah yang rumit.

1. Keterbatasan Modal

Diskoperindag Kabupaten Situbondo membantu dalam menyusun dan mengajukan pinjaman modal ke bank, dengan menyarankan bank mana yang memiliki suku bunga paling kecil. Namun dari temuan penelitian, Diskoperindag Kabupaten Situbondo tidak memberikan bantuan permodalan secara langsung kepada parra pelaku UMKM. Yang mana hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan, inovasi dan keberlanjutan UMKM.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Erwinda (2022), bahwa dalam mengembangkan UMKM di Kota Solok selama pandemi Covid-19 adalah adanya bantuan pinjaman modal dengan tingkat suku bunga paling rendah. Karena dengan diberikannya bantuan permodalan kepada pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka dengan biaya pinjaman yang lebih terjangkau. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya pendapat yang dikemukakan oleh Ife (1997), bahwa potensi yang bisa dimanfaatkan dalam pemberdayaan adalah karena adanya akses terhadap sumber daya ekonomi atau adanya finansial.

2. Pendampingan, bantuan teknis, dan pengajuan bantuan hibah yang rumit. Diskoperindag Kabupaten Situbondo memang memberikan bantuan hibah kepada para pelaku UMKM, bantuan hibah yang didapatkan oleh pelaku UMKM berupa Barang, namun dalam pelaksanaannya tidak semua pelaku UMKM mendapatkan bantuan hibah, terutama pelaku UMKM di Kelurahan Mimbaan yang belum mendapatkan bantuan hibah dan bantuan apapun dari pihak dinas. Dinas memang membantu para pelaku UMKM dalam menyusun dan mengajukan bantuan hibah akan tetapi dalam pengajuannya masih dianggap rumit dan berbelit-belit.

Dalam hal pendampingan, Diskoperindag Kabupaten Situbondo masih belum sepenuhnya melakukan pendampingan setelah adanya pelatihan yang diberikan, hal ini membuat para pelaku UMKM di Kelurahan Mimbaan masih bingung untuk mengaplikasikan hasil dari pelatihan yang diberikan tersebut. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Sulistiyan (2004), yang mengatakan bahwa dengan adanya bantuan dan hibah, baik dalam bentuk dana maupun barang.

KESIMPULAN

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo sudah melaksanakan perannya dalam memberdayaan pelaku UMKM di Kelurahan Mimbaan. Hal tersebut dapat diketahui dari tiga indikator peran, yaitu peran Diskoperindag sebagai fasilitator, peran Diskoperindag sebagai regulator, dan peran Diskoperindag sebagai katalisator. Peran Diskoperindag Kabupaten Situbondo memang sudah dilakukan, akan tetapi peran tersebut masih kurang maksimal dalam penyelenggaraannya karena masih terdapat adanya beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti dan diharapkan Diskoperindag Kabupaten Situbondo lebih menyederhanakan prosedur pengajuan bantuan hibah agar lebih mudah diakses oleh pelaku umkm, mengadakan program pendampingan berkelanjutan agar UMKM tidak hanya mendapatkan pelatihan satu kali, tetapi juga mendapatkan bimbingan dalam jangka panjang dan berkelanjutan, Diskoperindag dapat mengadakan pelatihan rutin tentang inovasi produk, desain kemasan, tren pasar terkini dan berkolaborasi dengan desainer lokal atau institusi pendidikan untuk mengembangkan ide-ide kreatif pelaku UMKM. Selain itu Diskoperindag dapat memberikan akses pasar atau bantuan promosi kepada para pelaku UMKM seperti membukakan akses pemasaran digital dan partisipasi dalam pameran atau bazar agar pelaku UMKM yang tidak konsisten menjadi lebih semangat untuk memproduksi produknya.

REFERENSI

- Eriyanti Fitri, Islam Aldiniatul (2024). *Peran Dinas Koperrasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Masyarakat (IKM) di Desa Balai Desa Batu Sandaran*. Jurnal Administrasi Pemerintahan. 5 (2), 1-12
- Fadli Feri, dkk (2022). *Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Journal of Management. 5 (3), 45-63
- Mursyidah Lailul, Najib Ainun (2023). *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Pemberddayaan Usaha Mikro*. Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial. 12 (1) 139-152
- Said Abdullah, dkk (2023). *Peranan Ddinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik. 1 (2), 213-220
- Antara (2023). *"Sebanyak 8700 pelaku umkm di situbondo menggunakan aplikasi qris untuk melakukan pembayaran"*. (Diakses 10 Januari 2025, pukul 05.32 WIB).
- Diskopukm (2023). *"Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha dan Kabupaten/Kota"*. (Diakses 11 Januari 2025, pukul 06.50 WIB).
- Jakarta Niaga Asia (2024). *"Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia 60,51 persen dan serap 96,92 tenaga kerja"*. (Diakses 12 Januari 2025, pukul 04.55 WIB).
- Afriansyah, Afdal, dkk (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang:PTT.Global Eksekutif Teknologi.
- Bungin. B (2012). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta:Kencana.
- Moelong, Lexy J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Syarief, Faroman (2020). *Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Makassar:Yayasan Barcode.
- Suharto, Edi (2009). *Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat*. Bandung:Refika Aditama.
- Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.